

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A B S T R A K S I

Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pemerintahannya sejak proklamasi kemerdekaan telah beberapa kali mengganti sistem pemerintahan demokrasinya. Penggantian ini dimaksudkan untuk memilih dan mencari suatu sistem pemerintahan demokrasi yang cocok bagi bangsa Indonesia. Mulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959 bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi ini muncul kabinet yang tergolong paling lama berkuasa dibandingkan dengan kabinet-kabinet yang lain dimasa itu. Kabinet tersebut adalah Kabinet Wilopo yang memerintah pada tahun 1952 sampai 1953.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Wilopo menentukan program kerjanya pada tanggal 3 April 1952 yang meliputi politik dalam negeri, politik luar negeri serta politik perekonomian. Dalam bidang politik dalam negeri pemerintah Kabinet Wilopo merencanakan untuk melaksanakan program-program seperti pemilihan umum, pengendalian politik dalam negeri, pembenahan dalam Angkatan Perang, serta akan melaksanakan pembenahan dalam bidang agraria. Bidang politik luar negeri pemerintahan Kabinet Wilopo merencanakan untuk menyelesaikan masalah program bantuan luar negeri menurut Mutual Security Act (MSA) supaya sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Sedang dalam bidang politik perekonomian Kabinet Wilopo merencanakan akan mengantisi dan mengatasi suramnya perekonomian Indonesia.

Untuk merealisasikan program kerja tersebut, Kabinet Wilopo dalam bidang politik dalam negeri melaksanakan pemilihan umum dengan langkah pertama mengajukan Rancangan Undang Undang Pemilu ke Parlemen dan dalam hal ini baru disahkan pada bulan April 1953. Kabinet tidak dapat melaksanakan pemilu karena keburu jatuh. Pengendalian politik dalam negeri dilaksanakan dengan mengkoordinasi tubuh Kabinet sendiri sehingga masing-masing menteri bisa saling melengkapi satu sama lain. Pembenahan Angkatan Perang dilaksanakan dengan memodernisir persenjataan dan meningkatkan kemampuan personil Angkatan Perang Indonesia. Modernisasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Angkatan Perang ini sempat tertunda akibat pergolakan dalam tubuh TNI yaitu Peristiwa 17 Oktober 1952, yang akhirnya menyebabkan keluarnya beberapa perwira senior TNI dari dinas militer. Pembentukan Agraria dilaksanakan pemerintah Kabinet Wilopo dengan berusaha memperbaiki Undang-Undang Hukum Agraria namun dalam pelaksanaannya pemerintah terbentur pada peristiwa Tanjung Morawa yang mengakibatkan Kabinet jatuh. Dalam bidang politik luar negeri penyelesaian masalah MSA dilaksanakan dengan mengadakan perundingan kembali dengan Amerika Serikat dan mengganti perjanjian MSA dengan perjanjian baru. Bidang perekonomian dilaksanakan pemerintah dengan melakukan penghematan pada semua sektor ekonomi untuk menutup defisit anggaran belanja Negara.

Dari semua program kerja Kabinet yang dilaksanakan, sebenarnya hanya ada satu hal yang mampu mendorong serta menghambat keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Sesuatu hal yang pokok tersebut adalah keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1952-1953. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan pemerintah berusaha meningkatkan dan memperbaiki keadaan perekonomiannya namun demikian keadaan ekonomi yang sulit itu pula yang menjadi ganjalan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian negara. Oleh sebab itulah keberhasilan Kabinet Wilopo lebih kecil dibandingkan dengan kegagalannya.